



Masyarakat Madani Dan Gerakan Anti-Korupsi Perspektif Azyumardi Azra

Prabawati Dwi Utami^{1*}

¹ Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

^{1*} Author1prabawati99@email.com

Abstrak

Runtuhnya Orde Baru di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pembatasan kebebasan masyarakat dan kebijakan otoriter yang mempengaruhi kehidupan politik. Demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada tahun itu menggoyahkan pemerintahan otoriter, membuka jalan bagi demokrasi. Azra, seorang intelektual Muslim, memperhatikan fenomena ini dan munculnya wacana *civil society* di Indonesia. Dia menekankan pentingnya reformasi konstitusional, institusi, dan budaya politik untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Azra juga menyoroti peran masyarakat madani dalam memerangi korupsi, menekankan perlunya *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan didasari oleh kajian literatur terdahulu seperti buku, artikel, berita serta referensi berupa karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat madani di Indonesia telah diidentifikasi sebagai faktor penting dalam mencegah korupsi yang merajalela. Konsep ini mengupayakan untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berkeadaban, serta berperan sebagai kohesi sosial dalam kepemimpinan. Dengan mengkampanyekan anti korupsi, masyarakat madani bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kepengimpinannya.

Kata Kunci: Masyarakat Madani, Korupsi, Azra

PENDAHULUAN

Runtuhnya orde baru banyak disebabkan dengan hal-hal yang melatarbelakanginya, diantaranya masyarakat dibatasi ruang gerak dan kebijakannya yang berimbas pada kehidupan politik. Karakter negara dengan system pemerintah otoriter di era Orde Baru mengakibatkan ketidakberjalannya demokrasi seperti yang diharapkan seperti halnya dalam kepemimpinan Soeharto yang pada masa itu telah memasung rakyatnya dalam kehidupan bersosial maupun berpolitik. Puncak penolakan kepemimpinan Soeharto terjadi pada Mei 1998 dengan terjadinya protes kepemimpinan yang dinilai pemerintah sudah tidak bisa mengurus negaranya sendiri dengan hutang negara yang semakin banyak yang pada akhirnya berdampak pada krisis ekonomi negara dan krisis politik. Karena ketidakpuasan akan hal tersebut, masyarakat Indonesia mulai menyuarakannya kepada pemerintah saat itu dengan demonstrasi besar-besaran yang rata-rata dipimpin oleh mahasiswa. Oleh karena itu, tahun 1998 banyak mahasiswa yang berjuang untuk menggulingkan pemerintah otoriter dengan membuka jalan bagi demokrasi (Maulana dkk., 2023). Para intelektual muslim memperhatikan fenomena tersebut dimasa mendatang yang lahirnya wacana *civil society* sebagai gerakan baru islam di Indonesia. Sejak orde Baru, istilah *Civil society* atau masyarakat madani ini telah menjadi perbincangan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk mencari solusi dalam menghadapi berbagai masalah di Indonesia. Salah satu tokoh dalam pemikiran *civil society* ini ialah azyumardi azra (Culla, 2002).

Azra merupakan salah satu tokoh pembaharu islam atau yang lebih dikenal sebagai cendekiawan muslim karena beliau menorehkan berbagai prestasi di bidang pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama islam, beliau merupakan tokoh pemikir yang tak pernah diam dan sangat produktif dalam melahirkan tulisan ilmiah terkait kajian keislaman. Pemikirannya lebih cenderung progresif, normatif dan terbuka secara rasional tanpa harus mengesampingkan persoalan emosional. Hasil dari inovasi yang dilakukan oleh Azra ialah tranformasi dari IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Syarif Hidayatullah dengan mengizinkan institusi pendidikan islam menjadi lebih terbuka, berkualitas, dan dihormati di masyarakat secara umum (Noor, 2018). Salah satu prestasi yang membanggakan adalah ia meraih gelar *Commander of the Order of British Empire* (CBE) dari Ratu Elizabeth II yang disebut sebagai suatu kehormatan dari Kerajaan Inggris dan azra pun dianggap sebagai salah satu bangsawan oleh kerajaan Inggris dengan sebutan "Sir" (Azra, 2020).

Menurut azra setidaknya terdapat upaya transisi Indonesia dalam menuju demokrasi dan diperlukan reformasi dalam tiga bidang. Pertama, reformasi konstitusional (*constitional reform*). Kedua, reformasi institusi, yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan institusi politik (*institutional reform and empowerment*). Ketiga, berkembangnya budaya politik yang demokratis (*political culture*). Menurut Azra, kerusuhan sosial sebenarnya mencerminkan perilaku aktor yang tidak demokratis, mengabaikan hukum, tidak beradab, dan mungkin bersifat brutal. Azra berpandangan bahwa masyarakat madani tidaklah menjadi pengganti pemerintah atau negara, juga bukan sekadar teman yang kuat

dalam kekuasaan. Kontribusi Azra terhadap transisi demokrasi di Indonesia terletak pada gagasannya untuk membangun budaya demokrasi melalui ruang pendidikan yang strategis. Tujuannya adalah mengembangkan budaya politik dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadaban sebagai karakteristik masyarakat madani (Azra, 2002).

Sejak era orde baru maupun lama hingga masa reformasi dan sampai pada saat ini korupsi sering terjadi di Indonesia. Seharusnya pemerintah yang bersih (*good governance*) melahirkan kinerja pemerintah yang berpihak kepada hidup banyak orang dan menciptakan roda pemerintahan yang dijalankan secara benar serta tidak ada kata menyimpang maupun perbuatan yang merusak publik. Namun hal tersebut terbalik ketika pemerintahan di huni oleh manusia yang tamak, rakus, picik dan pemikiran yang sempit, maka terjadi adalah penyimpangan, dan salah satunya adalah korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan kejahatan atau menyimpang yang secara terus menerus meningkat. Dapat dikatakan bahwa korupsi mempunyai dua komponen yakni niat dan kesempatan, dengan begitu seseorang memiliki sikap untuk berbuat curang hingga sampai menggelapkan dana tanpa rasa takut maupun bersalah, dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Wibawa dkk., 2021).

M. Dawam Raharjo mengatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat akan rusaknya tatanan (pemerintah, administrasi atau manajemen) yang telah disepakati (Yamin, 2016). Seseorang yang melakukan korupsi sedangkan gaji dan insentifnya sudah sesuai atau lebih dari cukup bukanlah karena kerakusan (*corruption by greed*) melainkan karena ketamakan (*corruption by need*). Hal ini pun yang seharusnya tidak dapat ditolerir lagi karena ketamakan apabila dibiarkan akan menjadi nafsu yang merusak pribadi, masyarakat dan negara (Azra, 2020). Teori yang dikembangkan oleh Emile Durkheim yakni teori Solidaritas Sosial yang menjabarkan tentang terjadinya korupsi, dalam teori tersebut memandang manusia sebenarnya bersifat pasif dan dapat dikendalikan oleh masyarakatnya. Emile berpendapat bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang dapat menciptakan kepribadian yang dapat mengontrol individu melalui fakta sosial melalui pendidikan dan lingkungan (Tim Penulis, 2018). Salah satu alasan kelemahan dalam pemberantasan korupsi pada masa Orde Baru dan Orde Lama adalah penggunaan metode *top-down*, di mana upaya pemberantasan hanya dapat dilakukan atas perintah dari atasan, berbeda dengan pendekatan *bottom-up* yang melibatkan laporan atau pengamatan dari masyarakat. Korupsi pada waktu itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan. Menurut Klitgaard, pembentukan lembaga antikorupsi bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi korupsi secara sistematis, efektif, dan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan keseriusan politik dari pemerintah agar upaya pemberantasan korupsi dapat berhasil (Azra, 2020).

Suwartojo dalam (Setiawan & Jesaja, 2022) menuturkan bahwa korupsi dijelaskan sebagai pelanggaran norma oleh satu individu atau lebih, dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan kekuasaan maupun kesempatan dalam kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang atau asset serta dalam proses layanan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan negara atau masyarakat umum demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Linda, 2022) yang menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan penurunan kesejahteraan pada masyarakat berakibat pada penderitaan dari pelaku yang tidak bertanggung jawab. Tindakan korupsi mendorong pemerintah untuk berupaya lebih keras dalam penanganan pencegahannya. Tentunya bukan hal yang mudah untuk memecahkan masalah korupsi, maka dalam hal ini masyarakat madani atau masyarakat sipil mempunyai peranan penting dalam hal pemberantasan korupsi, akan tetapi tidak hanya itu saja melainkan dampak positif untuk mendorong terjadinya evolusi peran masyarakat sipil. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk membahas pemikiran Azra tentang peran masyarakat madani dalam memecahkan atau bahkan mempunyai peran dalam hal memberantas korupsi di Indonesia yang digadang-gadang menjadi *good governance* (pemerintahan yang baik), apakah hal tersebut selaras dengan kepemimpinan yang terjadi

di Indonesia atau bahkan menjadi lebih buruk.

METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yang digunakan kualitatif guna memperoleh data deskriptif-analisis yang bertujuan untuk mencari data secara sistematis, faktual serta akurat. Artinya penelitian tersebut didasarkan pada kajian literatur terdahulu yang bertujuan untuk menganalisis dengan membaca mengenai pemikiran azra yang memiliki nuansa-nuansa yang khas dan berbeda dari pemikiran lainnya, dengan menggunakan referensi yang berasal dari buku, artikel, berita dan referensi berupa karya ilmiah (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Azyumardi Azra

Azyumardi azra atau biasa yang lebih di kenal dengan azra. Azra dilahirkan pada tanggal 4 Maret 1955 di Lubuk Alung, Sumatera Barat. Ia merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, akan tetapi ada yang mengatakan 8 bersaudara, karena pada 1950an kedua kakak azra tidak berumur Panjang yang kemudian pada tahun 1951 kedua orang

tuanya dikaruniai anak lagi. Ayahnya bernama Bagindo Azikar dan ibunya bernama Ramlah, arti namanya pun cukup puitis yakni permata hijau. Ia berada dalam kalangan keluarga yang faham akan pendidikan, berbeda dengan anak-anak pada umumnya yang mendapatkan pendidikan agama di surau atau langar, Azra mendapat langsung pendidikan agama dari ibunya (Andika Putra, 2021) yang merupakan seorang guru lulus dari madrasah al-Manar. Madrasah ini merupakan warisan para pembaharuan Sumatra Barat yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Rasyid Ridha dari Mesir (Hakim, 2017).

Pendidikannya dimulai dari sekolah dasar negeri 01 Lubuk Alung yang ia selesaikan pada tahun 1963. Pada tahun 1975, Azra menyelesaikan pendidikannya di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Padang. Selama perjalanan pendidikannya, ia juga menjadi mahasiswa S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1982. Kemudian, pada tahun 1998, ia mendapatkan beasiswa M.A dari Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University. Di Universitas yang sama, Azra juga menyelesaikan gelar Master of Philosophy (M.Phil) dan gelar Doktor of Philosophy dari Departemen Sejarah pada tahun 1990. Pada tahun 1992, ia meraih gelar Ph.D. Selanjutnya, pada tahun 2005, Azra dianugerahi gelar Dr. H.C dalam *Humane Letters* dari Corroll College, Montana, USA. Kehormatan guru besar di Universitas Melbourne pada tahun 2006-2009 (Azra, 1999).

Pada tahun 2001, Azra mendapatkan kesempatan untuk menjadi dosen tamu internasional di Departemen Studi Timur Tengah, Universitas New York, serta di Harvard University di Asia Center dan di Columbia University. Selain itu, Azra juga memiliki pengalaman sebagai pembimbing dan penguji untuk tesis dan disertasi di Universitas Malaya, Australian National University, University of Leiden, University of Melbourne, dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam perjalanan karirnya, Azra memiliki pengalaman sebagai Guru Besar Sejarah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pernah menjabat sebagai Sekretaris Wakil Presiden RI Bidang Kesejarahan Rakyat dan Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Anggota Komite Nasional Sejarah Indonesia, Anggota Komite Asosiasi Internasional Sejarawan Asia (IAHA), Profesor di Universitas Melbourne, dan Anggota Dewan Penasihat Yayasan PBB untuk Demokrasi (UNDEF) di New York. Pada 13 Maret 1983, setelah menyelesaikan studi sarjananya, Azra melamar gadis impiannya, Ipah H Fariyah yang merupakan adik kelas sewaktu kuliah di IAIN Jakarta. Ia pun dikaruniai empat orang anak: Raishanfikh Usada, Firman amny el Azra, M. Subhan Azra dan Emily Sakina Azra (Ilyas, 2019).

Karya -karya Azra

Azra merupakan salah seorang cendekiawan Muslim yang telah menghasilkan berbagai karya dalam bidang sejarah, budaya dan pemikiran islam. Karya beliau memberikan kontribusi penting terkait pemahaman ilmu, berikut beberapa hasil buku karya Prof Azyumardi Azra (Azra, 2020):

Buku-buku yang diterbitkan oleh Azra antara lain:

1. Jaringan Ulama, diterbitkan pada tahun 1994.
2. Islamic Political Disorder, diterbitkan pada tahun 1996.
3. Islam Reformis, diterbitkan pada tahun 1999.
4. Theological Context in Indonesia, diterbitkan pada tahun 1999.
5. Untuk masyarakat sipil, diterbitkan pada tahun 1999.
6. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, diterbitkan pada tahun 1999.
7. Esai tentang pendidikan Islam dan cendekiawan Islam, diterbitkan pada tahun 1999.
8. Islamic Renaissance in Southeast Asia, diterbitkan pada tahun 1999.
9. Essential Islam, diterbitkan pada tahun 2000.
10. Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Pelaku Sejarah, diterbitkan pada tahun 2002. (Azra, Relevansi Islam Wasathiyah, 2020).

Beberapa buku lain yang ditulis oleh Azra antara lain:

- 1) Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi, diterbitkan pada tahun 2002.
- 2) Reposisi Hubungan Agama dan Negara, diterbitkan pada tahun 2002.
- 3) Reaching Solidarity: *The Tension Between Democracy, Fundamentalism, and Humanism*, diterbitkan pada tahun 2002.
- 4) Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme, dan Keberagaman, diterbitkan pada tahun 2002.
- 5) Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal, diterbitkan pada tahun 2002.
- 6) Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Masa Transisi dan Modernisasi, diterbitkan pada tahun 2003.
- 7) Disertasi berjudul "Penyebaran Reformisme Islam di Indonesia: Jaringan 'Ulama' Timur Tengah dan Melayu-Indonesia pada Abad ke-18 dan ke-19", diterbitkan pada tahun 2004.
- 8) Indonesia Bertahan (Dari Berdirinya Negara Hingga Perayaan Demokrasi), diterbitkan pada tahun 2020 (Azra, 2020).

Corak Pemikiran

Menurut cara berpikirnya, Azra menjunjung tinggi objektivitas ilmiah, agar karya-karya beliau tidak menghakimi atau mengklaim dirinya benar tetapi tetap mencari kebenaran dan menyajikan informasi secara objektif dan ilmiah, inilah salah satu keunggulan pemikiran Azra. Hal tersebut pun tertuang dalam penulisan karyanya yang hampir semua menggunakan pendekatan sosio-histori, melalui pendekatan tersebut Azra mampu mengungkapkan apa yang tampak pada realita kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari latar belakang sejarah dan lingkungan sekitarnya. Terlepas dari pemikiran Islam, bisa dikatakan cara berpikir Azra sama dengan CakNur, karena Azra lebih memilih menghadirkan Islam damai yang toleran, suka menolong dan saling menghargai (Ahmad, 2013).

Dalam konteks ini, Azra berpandangan *civil society* merupakan unsur penting dalam hal negara demokrasi. Terdapat beberapa indikator yang menyebabkan masyarakat madani berada dalam pembentukan seperti cepatnya demokratisasi, terbentuk dengan kelas sosial ekonomi yang memiliki Pendidikan tinggi dan kekuatan ekonomi serta terbukanya akses informasi. Masyarakat sipil merupakan konsep yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan masyarakat madani yang berkembang di Eropa. Azra mengungkapkan masyarakat madani bukan sekedar kelompok dengan mengatas namakan konsep demokrasi dan demokratisasi, namun memiliki berkeinginan untuk mengubah status quo politik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat madani melampaui sekedar menjadi gerakan pro-demokrasi dan munculnya keadaan kritis dan oposisi terhadap rezim yang operatif. Demokrasi yang beradab karenanya harus diwujudkan melalui pendidikan kewargaan untuk membangun budaya politik, karena masyarakat madani adalah masyarakat yang berkualitas, beradab dan berkeadaban. Seperti pada masa Nabi Muhammad SAW yang terjadi di masyarakat Madinah sebagai masyarakat yang majemuk, toleran yang bisa hidup berdampingan dengan umat lainnya (Azra, 1999).

Sedangkan dalam konteks masyarakat azra menekankan beberapa pemikiran utama agar terwujudnya masyarakat islam yang harmonis. Pertama, moderasi beragama, ditengah keberagaman yang begitu besar di Indonesia tentu moderasi beragama menjadi hal penting untuk dipraktikkan. Azra berpendapat bahwa Islam sebagai agama terbesar di Indonesia muncul dan menerapkan moderasi beragama ditengah keberagaman yang ada. Ketika menyinggung masalah moderasi beragama yang bersangkutan dengan politik Azra menyatakan dengan sikap Islam wasathiyah. Islam wasathiyah mencerminkan nilai rahmatan lil 'alamin dalam Islam. Dengan begitu, pencapaian perdamaian tercapai tidak hanya kepada umat Islam Indonesia tetapi juga kepada umat Islam dunia secara umum. Azra menyebutkan perdamaian Islam dapat kembali memajukan peradaban dan kemajuan dunia (Putra dkk., 2021).

Kedua, pendidikan Islam, dalam konteks ini Azra menyampaikan pandangannya mengenai modernisasi pendidikan Islam yang terkait dengan tantangan abad ke-21 dan era globalisasi. Azra lebih menitikberatkan modernisasi sebagai konsep pemikiran yang menjadi dasar bagi aktivitas dan ide. Azra menggambarkan karakter membangun pendidikan dengan tujuan untuk mencapai tumbuhnya kepribadian seseorang melalui jiwa, intelektual, dan aspek lainnya. Azyumardi Azra juga mengungkapkan bahwa pendidikan di sekolah tidak hanya tentang pengajaran atau transfer ilmu semata, tetapi juga melibatkan pembentukan kepribadian atau karakter siswa. Perbedaan antara pendidikan dan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian peserta didik selain dari transfer ilmu dan keahlian. Dengan pendidikan yang demikian, suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, dan keterampilan kepada generasi muda, sehingga mereka siap menghadapi kehidupan. Pendidikan karakter harus mencapai keseimbangan antara pengembangan intelektual dan kepribadian peserta didik (Azizah, 2022).

Gagasan tentang Masyarakat Madani dan Anti-Korupsi oleh Azra

Masyarakat madani merupakan masyarakat yang berkualitas dan bertamadun atau berkeadaban. Dalam catatan azyumardi azra menyatakan bahwa dunia islam, khususnya di wilayah timur tengah sedang dilanda berbagai konflik atau dikenal dengan arab spring. Dimana banyak terjadi perang, pemberontakan, krisis serta konflik yang berkepanjangan, dampaknya rakyat di timur tengah yang mayoritas umat islam menjadi korbannya. Kematian, luka-luka, hingga harus mengungsi ke berbagai negara menjadi dampak daripada arab spring. Semua rentetan kejadian ini bukan hanya menjadi kesedihan bagi bangsa dunia, tetapi terkhusus bagi umat islam dan bangsa Indonesia. Apa yang terjadi di timur tengah harus menjadi pembelajaran bagi kita yang berada di Indonesia. Konflik tersebut bukan tidak mungkin akan terjadi di Indonesia, apabila kita tidak bisa mengambil Tindakan tepat untuk pencegahan, serta belajar dari apa yang terjadi di berbagai negara di timur tengah. Indonesia dengan keaneka ragamnya baik suku, agama, bahasa, adat, yang sangat beragam, ditambah dengan keadaan geografis yang luas dengan ribuan pulau, dan ribuan bahasa harus terus dirawat untuk tetap menjadi harmoni dalam masyarakat madani yang menerima dan menjalani perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila keanekaragaman ini tidak berhasil untuk dirawat maka perbedaan serta masyarakat yang beraneka ragam itu bisa menjadi ancaman. Selain karena keanekaragaman itu terjadinya kesenjangan sosial, maraknya budaya korupsi, bisa menjadi bensin ditengah jerami kering. Salah satu yang ditawarkan prof azyumardi azra ditengah ancaman konflik yang terjadi di timur tengah adalah menghidupkan masyarakat madani, masyarakat madani adalah masyarakat yang hidup dan tumbuh dalam keanekaragaman yang mempunyai keadaban tinggi dalam hal perbedaan. Dengan masyarakat madani keaneka ragam yang dimiliki Indonesia bisa menjadi sebuah

potensi untuk menjadi negara percontohan bagi negara muslim di timur tengah maupun negara digadaya lainnya. Masyarakat madani juga bisa menjadikan Indonesia bisa menjalankan demokrasi utuh mengalahkan amerika yang selama ini menjadi kiblat demokrasi. Untuk mewujudkan masyarakat madani, salah satu hal yang harus hadir dan memiliki peran besar adalah civil society. Azra mencontohkan *civil society* di Indonesia seperti Muhammadiyah dan NU, dua organisasi terbesar di tanah air ini adalah contoh nyata hadirnya *civil society* dalam kehidupan bangsa. Diantar fungsi hadirnya *civil society* dalam bangsa adalah kohesi sosial dan alternatif kepemimpinan untuk bangsa. Sehingga masyarakat tidak dihadapkan pada keruncingan pertarungan antar kekuasaan seperti yang terjadi di mesir dan negara timur tengah lainnya. Dalam kehidupan masyarakat madani *civil society* menjadi benteng untuk menegakan keadaban ditengah terjadinya konflik horizontal, gejala friksi dan dinamika ebangsaan lainnya. Maka secara langsung atau tidak kehadiran *civil society* dapat membentuk *civic culture* di kalangan anggota dan masyarakat dengan penuh keadaban (Azra, 2020).

Korupsi berarti menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, hal tersebut menjadi salah satu hal terbesar yang terjadi pada tingkat paling tinggi. Memberantas korupsi pun tidak mudah karena korupsi sudah menjadi suatu budaya yang melekat individu/kelompok level atas atau dapat dikatakan yang memegang kekuasaan. Pada tahun 2022, *Transparency International Indonesia* merilis Indeks Persepsi Korupsi yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-96 dari 180 negara di dunia. Berbagai upaya pun telah dilakukan seperti pemberlakuan *reward* dan *punishment*. Maka dari itu diperlukannya kegiatan kampanye yang menjadi program dengan tujuan menumbuhkan kesadaran mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi. Kegiatan kampanye tentang anti korupsi disini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa itu korupsi dan bahayanya, selain itu juga dapat menjadi pengaruh masyarakat dalam bertindak dalam artian kegiatan kampanye anti korupsi tidak hanya sekedar informatif namun harus diarahkan kepada tujuan yang lebih dari sekedar perubahan kognitif, akan tetapi untuk perubahan sikap dan perilaku terhadap korupsi (Baharuddin dkk., 2021).

Azra menyatakan bahwa tata kelola pemerintah yang baik dibutuhkan pemberantas korupsi dengan baik pula. Menurutnya dalam penanganan korupsi diperlukan langkah strategis seperti dengan cara mengembangkan kemampuan untuk mengartikulasi dari konsekuensi korupsi terhadap sistem politik, sosial dan ekonomi. Azra pun menyebutkan kepemimpinan berbasis Pancasila penting untuk diimplementasikan dalam kepemimpinan informal seperti organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan. Cara menangani korupsi bertujuan untuk membangun koalisi reformasi agar terbentuknya *good governance* yang sebenar-benarnya (Tahir & Noor, 2020). Hal menarik ditemukan dalam penelitian (Hai dkk., 2021) yang menunjukkan prinsip pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan undang-undang, harus mampu menyampaikan informasi mengenai pemerintahan secara transparan dan akurat kepada masyarakat, mampu menjelaskan dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan dengan proporsional.

Adapun kepemimpinan yang bertolak dengan lima sila dalam Pancasila, pemimpin tidak hanya berteori dan mengimaninya namun juga mempraktikkan nilai pancasila tersebut dalam kepemimpinan dan kebijakannya. Pentingnya dalam kepemimpinan dalam ranah institusi politik dan pemerintah khususnya pembentukan *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik sebagai amanat reformasi. Mayoritas pemimpin politik tidak pernah serius dalam melakukan hal tersebut karena pertimbangan politik pragmatis masih lebih besar daripada mimpi futuristik untuk melihat Indonesia keluar dari endemik korupsi. Dengan begitu, kepemimpinan dengan berlandaskan pancasila merupakan suatu upaya untuk menginternalisasikan nilai pancasila secara mutlak baik di lembaga tingkat lokal, nasional maupun internasional. Pemimpin yang menjadikan pancasila sebagai landasan dalam praktiknya menjadikan negara Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang adil dan beradab, mengedepankan moralitas, integritas, kejujuran, kepekaan sosial serta mampu berkomunikasi dengan baik (Hernandi, 2023).

Tujuan dengan adanya pemerintah yang baik adalah untuk mewujudkan pemerintahan negara yang solid serta bertanggung jawab dalam menjaga sinergi antar masyarakat, dengan mengkampanyekan anti-korupsi dapat menjadikan pemerintahan Indonesia menjadi baik (*good governance*). Selaras dengan penelitian (Purba & Huda, 2022) yang mengupayakan pemerintah yang baik dengan menggunakan prinsip pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, terdapat pula kendala dalam mengupayakan pelaksanaan prinsip *good governance* sendiri, dengan berpijak pada asas atau pedoman umum pemerintah yang sudah jelas diatur pada undang-undang nomor 30, pasal 10 tahun 2014 mengenai pemerintahan dan pelayanan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dan legalitas. Di sisi lain azra berpendapat bahwa untuk menjadikan negara Indonesia menjadi *good governance* diperlukan adanya tiga kebijakan untuk memberantas atau paling tidak dapat mengurangi korupsi. *Pertama*, merubah kebijakan yang dapat mendorong seseorang atau memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi, *kedua*, menata kembali struktural penggajian dan insentif material yang berlaku pada lembaga birokrasi dan institusi politik lainnya, dan *ketiga*, mereformasi kembali lembaga hukum untuk menegakkan serta memperkuat hukum (Azra, 2020).

KESIMPULAN

Azra merupakan salah seorang cendekiawan Muslim yang telah menghasilkan berbagai karya dalam bidang sejarah, budaya dan pemikiran islam, pemikiran beliau lebih cenderung progresif, normatif, dan terbuka. Corak

pemikirannya lebih menjunjung tinggi objektivitas ilmiah agar tidak serta merta langsung menghakimi atau mengklaim bahwa dirinyalah yang benar. Sebagai salah satu tokoh yang mengemukakan pendapat tentang betapa pentingnya transisi Indonesia menuju demokrasi melalui reformasi konstitusional, institusi dan budaya politik. Masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkualitas dan berkeadaban, dengan diadakannya masyarakat madani di tengah era banyaknya terjadi korupsi menjadi salah satu faktor untuk mencegah korupsi terjadi di negara Indonesia, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Fungsi dengan adanya masyarakat madani untuk mengkampanyekan anti korupsi sebagai kohesi sosial dan alternatif kepemimpinan untuk bangsa. Azra menyatakan dengan adanya anti korupsi tersebut diharapkan pemerintah dapat menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kepemimpinannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dan dapat memberikan sumbangsih terhadap keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2013). Mengenal Azyumardi Azra dalam Pemikiran Islam . *Journal Analytica Islamica*, 2(2), 353–369. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jai.v2i2.411>
- Azizah, F. M. (2022). Pendidikan Karakter Dalam Pembaruan Pendidikan Islam (Studi Atas Pemikiran Azyumardi Azra). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(03), 759. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.2559>
- Azra, A. (1999). *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Azra, A. (2002). *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antar Umat* . Penerbit Buku Kompas .
- Azra, A. (2020). *Relevansi Islam Wasathiyah: dari Melindungi Kampus hingga Mengaktualisasi Kesalehan*. Penerbit Buku Kompas .
- Baharuddin, T., Salahudin, Sairin, S., Qodir, Z., & Jubba, H. (2021). Kampanye Antikorupsi Kaum Muda melalui Media Sosial Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 58. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.3827>
- Culla, A. S. (2002). *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan cita-cita reformasi* (1st ed.). Raja Grafindo.
- Hai, K. A., Watulingas, R. R., & Singal, R. (2021). Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Era Pandemi Covid Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal Lex Administratum: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat*, 9(7), 35–45.
- Hakim, L. (2017). AZYUMARDI AZRA SEBAGAI SEJARAWAN ISLAM. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama Dan Humaniora*, 21(2), 11–28. <https://doi.org/10.15548/tabuah.v21i2.64>
- Hernandi, A. (2023). MODEL KEPEMIMPINAN PANCASILA DALAM MASYARAKAT PLURAL: SEBUAH KAJIAN PUSTAKA. *Jurnal Pembumiann Pancasila* , 3(1), 58–64. <https://jurnalpembumiannpancasila.id/index.php/jpp/article/view/43>
- Ilyas, I. M. (2019). Azyumardi Azra Thinking About Paradigm Scientific And Institutional And Implications For The Development Of Islamic State University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. *Proceedings PANTUM KUIS Selangor*, 58–71.
- Maulana, D. F., Aulia, F., Nafiani, I., W, K. K. E., & Nurparatiwi, H. (2023). Manusia Sebagai Pelaku Sejarah (Studi Kasus: Peran Mahasiswa dalam Runtuhnya Orde Baru). *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2), 69–77. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.849>
- Noor, W. (2018). Azyumardi Azra : Pembaruan Pemikiran dan Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v5i1.827>
- Purba, F. N., & Huda, M. M. S. (2022). Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(3), 138–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i3.466>
- Putra, A., Homsatun, A., Jamhari, J., Setiani, M., & Nurhidayah, N. (2021). Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra sebagai Jalan Moderasi Beragama. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 212–222. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>

- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Tahir, M. S., & Noor, A. F. (2020). Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Quran. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengetahuan Budaya Al-Quran*, 20(2), 216–249. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan>
- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kemeristekdikti.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>
- Yamin, M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. PT Remaja Rosdakarya .